

Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains

Vol. 8, No. 2, Desember 2019

Website: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita>

ISSN 2303-2952, e-ISSN 2622-8491

Sistem Politik Iran Kontemporer: dari Westernisasi hingga Islamisasi**Kiki Mikail**Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, kikimikail@radenfatah.ac.id**Abstrak**

Tulisan ini mengkaji sistem politik Iran pada masa revolusi Islam. Tujuan utama dari tulisan ini adalah mendeskripsikan bagaimana perubahan system politik Iran yang begitu cepat sehingga menjadi musuh utama Amerika Serikat. Dengan kebijakan Iran yang anti barat untuk kemandirian politik-ekonomi, maka dihadirkan sebuah sistem politik wilayatul faqih. Sistem ini menjadikan seorang ulama mengendalikan pemerintahan Iran, baik di tingkat pusat hingga ke seluruh daerah Iran. Dengan demikian, cita cita revolusi yang dimaksudkan untuk menguatkan keislaman terjaga dengan baik karena dikelola oleh ulama yang faham tentang agama.

Kata Kunci: Politik Iran, Westernisasi, Islamisasi**Abstract**

This paper to explore iranian political system during revolution period through islamics revolution. The main purpose of this paper is how the political system in Iran was change so dramatically and Iran became the true enemy of USA. Iran anti-western policies with the idea of political-ecomy independence, so there was a political system adopted by Iranian after revolution named Wilayatul Faqih. The system makes a cleric of Iran handling the government both central and local government. Thus the goal of the revolution intended to strengthen Islamic values was well preserved by cleric's.

Keywords: Iranian politics, Westernization, Islamization**Pendahuluan**

Revolusi Islam Iran yang sekarang diperingati setiap 22 Bahman (Hijriah Qomariah menurut Kalender Iran) merupakan sebuah rangkaian peristiwa politik yang sangat panjang yang di inisiasi oleh Imam Khomeini dan beberapa tokoh oposisi dengan dukungan rakyat Iran dengan maksud mengubah pemerintahan Iran dari Monarki dibawah kepemimpinan Shah Mohammad Reza Pahlevi menjadi Republik Islam yang diyakini masyarakat Iran mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik--paling tidak humanis-- yang sebelumnya sangat korup, diktator, dan anti Islam¹.

Demonstrasi terstruktur dan massif terhadap pemerintahan Shah dimulai pada bulan Oktober 1977. Beberapa kelompok aktivis baik dari kalangan sekuler, komunis bahkan agamis bersatu melawan pemerintahan syah Pahlevi. Dapat dikatakan bahwa salah satu faktor penting meletusnya

¹ Kiki Mikail, "IRAN DI TENGAH HEGEMONI BARAT (Studi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi 1979)," *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 13, no. 2 (2013).

Revolusi Islam Iran adalah karena rapuhnya sistem politik Iran pada masa rezim Shah Pahlevi². Karena, diantara sistem politik dunia modern, hemat penulis, sistem monarki merupakan salah satu sistem yang rentan terhadap revolusi dikarenakan ketidakpuasan masyarakat terhadap regenerasi kepemimpinan yang tidak sehat, terutama dikarenakan kekuasaan hanya terfokus pada satu orang atau satu keturunan. Disaat Shah Iran Semakin otoriter dan represif, korupsi semakin merajalela, serta hak hak dalam menjalankan ibadah dan tuntunan syariat Islam semakin dibatasi, maka keinginan untuk melakukan perubahan tidak akan mampu untuk dibendung lagi.

Namun, revolusi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Revolusi kerap banyak memakan korban. Baik dari pihak demontran maupun kekuatan pasukan yang disediakan rezim. Disaat tuntutan perubahan dari berbagai elemen masyarakat Iran semakin menguat, disaat itulah rezim sekuler Shah memanfaatkan kekuatan intelejen SAVAK (*Sazman-e Ettela'at va Amniyat-e Keshvar; Intelligence and National Security Organisation*) untuk melakukan tekanan politik terhadap tokoh yang anti terhadap pemerintahannya. SAVAK selain kesatuan tempur yang solid, juga dianggap dunia barat pasukan tempur terkuat kelima didunia. Program westernisasi Shah disambut hangat oleh kaum nasionalis-kapitalis yang menginginkan Iran segera melakukan westernisasi seperti yang pernah dilakukan oleh Mustofa Kemal Attaruk di Turki. Kemajuan yang dialami Turki—menurut Shah Fahlevi—tidak terlepas dari program westernisasi yang dijalankan oleh mereka. Untuk itu, ide ide sekuler yang digulirkan oleh Mustofa Kemal Attaruk, sedikit banyak telah menginspirasi Shah Fahlevi.

SAVAK merupakan organisasi intelejen yang didirikan oleh Shah berkat bantuan CIA dan Mossad, organisasi intelejen Israel, dengan tujuan untuk memperkuat pemerintahan Shah pada tahun 1957 dan dibubarkan sampai dengan meletusnya revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Pada zaman Shah Mohammad Reza Pahlevi, SAVAK merupakan salah satu kekuatan intelejen yang ditakuti oleh oposisi, karena SAVAK tidak segan untuk melakukan penganiayaan dan penahanan terhadap musuh politik³. Keinginan Shah untuk memperkuat pemerintahannya dimulai dari usaha untuk menyingkirkan perdana menteri Mosadegh yang dianggap telah menggerogoti dan melemahkan kekuatan dan dominasi politik shah secara perlahan.

Keinginan Shah untuk menyingkirkan Mosadegh didukung oleh Amerika Serikat yang “gerah” melihat aksi politik Mosadegh yang lengket dengan komunis Uni Soviet dan berani “*show of power*” dengan menasionalisasi beberapa perusahaan asing di negaranya. Amerika Serikat kemudian mengutus Kermit Roosevelt dari Badan Intelejen CIA untuk melakukan perjalanan rahasia ke Iran dengan maksud mengkoordinasikan operasi intelejen dengan Shah dan jenderal Fazlollah Zahedi. Namun Mosadegh tidak tinggal diam, dia melakukan aksi balasan dengan menangkap orang-orang yang setia terhadap Shah. Rencana awal Shah untuk menyingkirkan

² (Arjomand, 1986)

³ Nikki R. Keddie and Yann Richard, *Modern Iran; Roots and Result of Revolution* (Yale University Press, 2006).

Mosadegh akhirnya gagal sehingga menyebabkan Shah dan pengikut setianya Zahedi kabur dari negara tersebut⁴.

Namun Shah tidak tinggal diam dengan segera menyusun rencana. Pada tanggal 19 Agustus 1953, Shah kembali ke Iran setelah sebelumnya tentara pro Shah yang didukung intelejen Amerika Serikat dan Inggris berhasil mengalahkan tentara yang loyal terhadap Mosadegh.⁵ Kekalahan tersebut menyebabkan Mosadegh harus masuk tahanan selama tiga tahun dengan tuduhan berusaha menggulingkan pemerintahan monarki Shah. Namun kemudian Mosadegh diizinkan menjadi tahanan rumah dengan tinggal dikampung kelahirannya diluar Teheran hingga dia meninggal pada tahun 1967.

Segera setelah mengambil alih kekuasaan, pada tahun 1963 Shah Pahlevi melakukan revolusi putih dalam rangka untuk mengkonsolidasikan kekuatan politiknya yang mana pada masa Moosadegh telah pudar. Shah mengklaim revolusi putih sebagai sebuah upaya untuk menuju westernisasi. Selain itu, tujuan dari revolusi putih tersebut adalah untuk menyingkirkan pengaruh para tuan tanah di Iran yang sebelum sangat kuat dan menciptakan basis kekuatan baru dengan dukungan para petani dan kelas pekerja. Revolusi putih tersebut diproklamirkan oleh Shah diantaranya sebagai upaya untuk menyerukan reformasi kepemilikan tanah, nasionalisasi hutan, penjualan perusahaan milik negara untuk kepentingan pribadi, perubahan peraturan pemilihan umum untuk memberikan hak lebih kepada perempuan, pembagian keuntungan dalam industry, dan kampanye anti buta huruf di sekolah sekolah negeri. Revolusi putih berlangsung hingga menjelang berakhirnya kekuasaan shah pada tahun 1978.

Pada akhir 1977, iklim ekonomi Iran semakin memburuk dan kesewenangan yang dilakukan oleh Shah semakin hari semakin mendapatkan perlawanan dan penentangan dari masyarakat. Serangan dan demonstrasi anti pemerintah meluas yang pada gilirannya telah menyatukan sekelompok besar islamis, sayap kiri dan liberal oposisi shah. Kaum Islamis yang dipimpin oleh Ayatullah Imam Khomeini (berbasis di Perancis) muncul sebagai kelompok oposisi yang paling efektif dan terorganisir. Pada Januari 1979, sebuah kerusuhan memaksa Shah ke pengasingan dan secara tidak langsung telah membuka jalan bagi Imam Khomeini untuk kembali ke tanah kelahirannya setelah sebelumnya diasingkan di Perancis. Imam Khomeini untuk sementara membentuk pemerintahan baru bersama dengan 15 anggota dewan revolusi Islam dan pada 1 April 1979 Iran dinyatakan sebagai republik Islam.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang menurut Sugiyono⁶ adalah suatu metode untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui pengumpulan data yang dikaji melalui literatur-literatur baik yang berkaitan

⁴ Glenn E Curtis and Eric Hooglund, *Iran: A Country Study: A Country Study* (Government Printing Office, 2008).

⁵ Stephen Jones, "The Islamic Republic of Iran: An Introduction," *Economic indicators* 3 (2009): 9.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013).

perubahan sosial dan politik. Penelitian deskriptis analitis mengambil masalah dengan memfokuskan perhatian pada masalah-masalah sebagaimana adanya yang kemudian diolah dan dianalisis untuk kemudian disimpulkan. Selain itu, pendekatan kualitatif juga digunakan karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang mendalam yang berkaitan dengan sebuah peristiwa atau perubahan sosial yang dalam hal ini mengenai bagaimana perubahan sosial dan politik Iran yang begitu cepat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pandangan Ibnu Khaldun bahwa politik sebagai sebuah upaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, maka segala sesuatu yang dimaksudkan dari gerakan politik adalah diarahkan dan dimaksudkan untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat secara umum. Politik dalam pandangan pemikir Islam, tidak berbicara *an sich* terhadap proses peralihan atau "perebutan" kekuasaan, namun lebih dari itu, politik dimaksudkan sebagai alat untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik seperti yang termaktub didalam al-qur'an yaitu "*Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*" (QS. As-Saba ayat 15). Pun demikian dengan revolusi Islam yang digulirkan oleh Imam Khomeini, rohaniawan dan pos pos kekuatan Iran politik yang lama kelamaan "gerah" terhadap aksi politik yang dilakukan pemerintahan syah Pahlevi. Kekuatan politik tersebut bagaikan "bom waktu" bagi shah. Diharapkan atau tidak, pada waktunya akan meledak dan menuntut shah untuk menanggalkan segala kekuasaan yang melekat pada dirinya.

Berkaitan dengan pemerintahan Islam, Imam Khomeini pada tahun 1970 menulis sebuah buku dengan judul *Hukumat-e Islami: Velayat-e Faqih*.⁷ Dalam bukunya tersebut Imam Khomeini menyebutkan garis-garis besar pemerintahan Islam yang menurutnya harus dijalankan sesuai dengan syari'ah atau hukum Islam. Oleh karenanya, seorang ahli hukum Islam—atau faqih—harus mengawasi struktur politik negara. Dengan hadirnya pemerintahan baru, maka konstitusi Iran pun mengalami perubahan mendasar, dengan bentuk sistem pemerintahan yang didasarkan pada tiga pilar kekuasaan yakni kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun diatas tiga pilar kekuasaan tersebut, Rahbar atau *velayat-e faqih* memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan baru Republik Islam Iran.

Sesuai dengan garis-garis besar pemikiran Imam Khomeini mengenai konstruksi negara Islam, maka tujuan dari revolusi Islam Iran adalah untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya dan mengembalikan ideologi Islam ke masyarakat Iran. Maka hadirnya *velayat-e faqih* sebagai sebuah jawaban untuk mengembalikan ideologi Islam ke dalam pemerintahan Iran adalah sebuah keniscayaan. Oleh karenanya, sesuai dengan konstitusi Republik Islam Iran, konsekuensi dari sistem Republik Islam adalah seluruh ajaran Islam harus menjadi dasar dari semua hubungan ekonomi-politik, sosial dan kebudayaan. Dalam sistem pemerintahan Islam Iran, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan kekuasaan legislatif diberikan kepada

⁷ Ruhollah Khomeini, *Islamic Government: Governance of the Jurist* (Alhoda UK, 2005).

parlemen. Namun, meskipun demikian, kedua lembaga negara tersebut tetap dalam pengawasan ulama sepenuhnya.

Konsep negara menurut Imam Khomeini tidak seperti demokrasi murni, artinya manusia sebagai makhluk yang sering melakukan kesalahan tidak dapat dibebaskan untuk mengatur dan membuat perundang-undangan, namun otoritas mutlak pembuat undang-undang mutlak ada di tangan tuhan. Menurut Imam Khomeini, memberikan otoritas untuk membuat undang-undang kepada manusia, bukan saja menyalahi aturan tuhan, bahkan dapat memperburuk kondisi negara tersebut karena manusia lebih banyak mengikuti hawa nafsunya. Untuk itu, tawaran Imam Khomeini selama masa belum hadirnya Imam Mahdi, maka kepemimpinan kenegaraan harus diserahkan dan dikelola oleh seorang ulama yang faqih dan mengerti urusan dunia dan akherat. Oleh karenanya, dalam perspektif Islam, tata kelola negara tidak berasal dari posisi kelas atau dominasi kelompok maupun individu.⁸

Maksud dan tujuan revolusi Islam sendiri seperti yang termaktub dalam konstitusi Iran adalah gerakan untuk kemenangan seluruh manusia yang merasa ditindas oleh para kaum penindas. Maka oleh karena itu, konstitusi mempersiapkan landasan untuk melanjutkan revolusi Islam baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka untuk memperluas hubungan internasional dengan menyambut gerakan Islam lainnya yang bangkit melawan penindas dan membentuk suatu komunitas universal.

Tepat satu tahun setelah kepergian Shah Pahlevi dari Iran, pada 3 desember 1979 masyarakat Iran berhasil menetapkan konstitusi baru untuk menggantikan konstitusi tahun 1906--yang telah digunakan oleh rezim shah --sebagai pondasi dari pemerintahan Islam yang dirumuskan oleh pemimpin revolusi Islam Iran. Dalam konstitusi Republik Islam yang baru, baik *Majelis Shura-e Islam* maupun *Shura-e Negahban* yang memiliki wewenang untuk merancang dan menetapkan konstitusi tetap membutuhkan persetujuan akhir dari majelis ahli. Bahkan, dalam amandemen konstitusi Iran pada 28 Juli 1989, sebuah lembaga baru yaitu dewan kemaslahatan dan kearifan berhasil dibentuk dengan kewenangannya adalah untuk pengawasan terhadap undang-undang yang dibuat oleh kedua lembaga tersebut, sehingga perundang-undangan di republik Islam tidak akan keluar dari garis-garis ajaran Islam. Anggota dari Majelis Syura-e Islami merupakan para calon legislatif yang dipilih pada pemilihan umum parlemen yang dilakukan empat tahun sekali. Sedangkan anggota *Shura-e Negahban* terdiri dari 12 orang yang ahli dalam hukum. 6 dari 12 orang tersebut ditunjuk oleh pemimpin tertinggi Iran sedangkan 6 orang lainnya diajukan oleh lembaga yudikatif Iran dan disetujui oleh parlemen Islam Iran.

Pada Januari 1980, Abolhasan Bani Sadr, yang didukung oleh kalangan reformis modernis terpilih sebagai presiden pertama republik Islam Iran. Namun, Abolhasan Bani Sadr tidak lama setelah itu, dia harus dimakzulkan oleh parlemen Iran dan diberhentikan oleh Ayatullah Imam Khomeini. Ketegangan yang terjadi antara Partai Republik Islam— yang disupport oleh Ayatullah Imam Khomeini— dengan perolehan kursi 85 dari 270 kursi yang tersedia di parlemen Iran—dan

⁸ *Islamic Republic of Iran Constitution* (Iran, n.d.).

partai *Mujahidin-e khalq* merupakan salah satu alasan dimakzulkannya Bani Sadr oleh parlemen Iran. Bani Sadr diduga oleh parlemen telah melakukan konspirasi politik dengan kekuatan politiknya melawan ulama yang berkuasa, khususnya Muhammad Beheshti yang saat itu menjabat sebagai ketua lembaga yudikatif Republik Islam Iran.

Setelah lengser, Muhammad Ali Raja-i yang sebelumnya menjabat perdana menteri Iran terpilih sebagai presiden Iran. Namun, tidak lama setelah itu, Ali Raja-i tewas terbunuh dalam sebuah pemboman pada 30 Agustus 1981 bersama perdana menteri Mohamad Javad Bahonar diruang kabinet. Sebuah tragedi yang mengenaskan dan telah memakan banyak korban yang diduga dilakukan oleh pihak *Mujahidin-e Khalq* yang tidak puas dengan pemerintahan Iran. Setelah kematian Raja-i, Majelis Ahli menyetujui empat orang kandidat untuk maju dalam bursa calon presiden Iran. Dari keempat orang tersebut, Ali Khamenei berhasil memenangkan pemilihan presiden dan menjadi ulama pertama yang berhasil menjadi presiden Iran.

Ali Khamenei dengan segala polemik pada masa pemerintahannya, harus menghadapi kenyataan pahit menerima agresi dari tetangga negaranya. Selama kurun 8 tahun menjabat, presiden Ali Khamenei disibukkan dengan pertahanan dan penyediaan pasokan senjata dalam menghadapi agresi militer yang dilakukan oleh Irak yang dimulai pada tanggal 22 September 1980.⁹ Diyakini bahwa hubungan bilateral kedua negara tersebut semakin memburuk bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan monarki Shah Pahlevi. Kedua negara terlibat dalam perang propaganda, teror dengan perkiraan korban lebih dari satu juta orang. Dengan estimasi biaya satu milyar Us dollar perbulan.

Iran yang baru saja “mendepak” Amerika dari negaranya mendapat ujian berat harus menghadapi saudaranya sendiri sesama muslim. Irak dengan dukungan Uni Soviet -Amerika dan Iran dengan militansi Syiah nya berseteru dikarenakan konflik perbatasan shatt Arab yang menjadi perebutan kedua negara. Kesepakatan perbatasan kedua negara tersebut telah disepakati ketika emperatur ottoman dan dinasti safavid berkuasa pada tahun 1639. Batasan yang disepakati kedua belah pihak adalah antara gunung Zagros disebelah timur sedangkan perbatasan disebelah barat adalah sungai tigris dan Shatt al-arab.

Dalam sejarahnya, perang teluk yang melibatkan Iran-Irak sendiri terjadi dalam 5 fase peperangan yang berbeda. Fase pertama perang yang dimulai pada bulan September 1980 dan berakhir pada Maret 1981. Sedangkan fase kedua adalah meskipun Iran dan Irak memiliki jarak yang tidak terlalu jauh, tetapi mereka tidak dapat melakukan apa-apa selama kurun setahun, karena satu sama lain masih saling mengukur kekuatan militer. Fase ketiga yang dimulai pada Maret 1982 ditandai dengan serangan balasan Iran yang berhasil memukul balik tentara Irak yang sebelumnya sempat menduduki beberapa kota perbatasan Iran-Irak sampai dengan tahun 1983. Fase keempat ditandai dengan kebuntuan kesepakatan kedua belah pihak hingga tahun 1988. Sedangkan fase kelima fase berakhirnya perang kedua negara melalui gencatan senjata pada Agustus 1988.

⁹ Will D Swearingen, “Geopolitical Origins of the Iran-Iraq War,” *Geographical Review* (1988): 405–416.

Hubungan harmonis Iran-Amerika ditandai dengan kerjasama bilateral kedua negara dengan disepakatinya penandatanganan MoU pengembangan nuklir Iran-USA.¹⁰ Hingga tahun 1971 Shah Iran telah menjalin sejumlah kerjasama nuklir dengan beberapa negara Eropa lain, seperti Jerman untuk pembangunan reaktor Bushehr, Perancis untuk memproduksi sekitar 23 megawatt listrik pada reaktor Darkhoin, AS sebagai pemasok bahan bakar nuklir, dan pembelian saham perusahaan Ordif.

Dengan dijatuhkannya rezim Shah pada Revolusi Iran tahun 1979, maka hubungan kedua negara memasuki fase yang sangat buruk. Beberapa diplomat AS bahkan disandera dan diminta kembali ke negaranya dengan tanpa syarat. Keinginan Republik Islam Iran untuk melepaskan diri dari pengaruh barat juga didukung oleh para Mullah dan pihak oposisi Shah Pahlevi yang telah memimpin revolusi Islam Iran karena Barat dianggap telah banyak mencampuri urusan dalam dan luar negeri negara tersebut. Fase berikutnya adalah ketika pemerintahan Bill Clinton tahun 1995 dan hingga sekarang memberlakukan beberapa embargo terhadap Iran. Meskipun hubungan antar kedua negara tersebut semakin memburuk sejak tahun 1979, namun ketegangan tersebut tidak pernah menimbulkan perang fisik secara langsung antar kedua negara. Fakta tersebut dalam dibuktikan dalam sejarah, bahwa AS dan Iran tidak pernah sekalipun perang secara militer, meskipun sering bersitegang terutama persoalan geopolitik dan pengaruh di timur tengah. AS selama ini pro terhadap kebijakan Israel, bahkan telah mengeluarkan resolusi kepada negara negara anggota PBB untuk memindahkan ibukota Israel ke Yerusalem. Namun disisi lain, Iran mengambil kebijakan yang konsisten untuk menolak pendudukan Israel di Palestina khususnya pemindahan ibukota Israel ke Yerusalem.

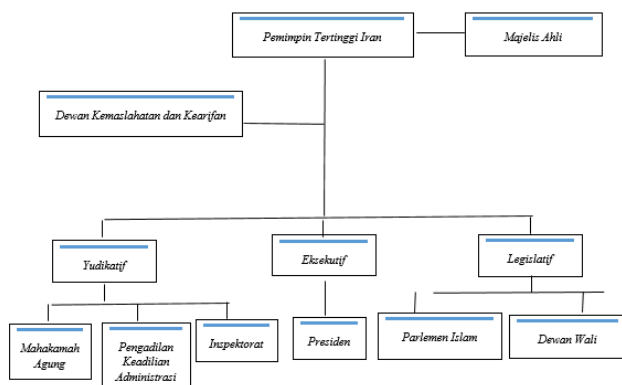
Sistem Politik Iran di Era Revolusi

Sempat memiliki perdana menteri, pada tahun 1989 Konstitusi Iran diamandemen dengan salah satu hasilnya adalah menghilangkan kursi perdana menteri dari system pemerintahan Republik Islam Iran. Mir Hossein Mousavi yang sempat menjadi pesaing berat Ahmdinejad pada Pilpres 2009 lalu merupakan perdana menteri Iran terakhir sekaligus pesaing terberat Ahmadinejad pada saat itu. Dengan kekuatan massa yang dimiliki, meskipun Ahmadinejad memenangkan pilpres 2009, namun tidak sedikit massa yang turun ke jalan dengan maksud menolak hasil pilpres tersebut karena pihak partai hijau yang dikomandoi oleh Hossein Mousavi merasa “aneh” dengan cepatnya hasil pilpres yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan yang hingga saat ini otoritasnya masih dipegang oleh kementerian dalam negeri Iran sebagai satu-satu lembaga yang otoritatif dalam konteks Pemilihan umum. Iran sendiri melakukan pemilihan secara terpisah antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif, dimana personel kedua lembaga tersebut dipilih untuk kurun masa empat tahun.

¹⁰ Achmad Fatoni, “Program Pengembangan Nuklir Iran Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Iran (1957-2006 M),” *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 3, no. 1 (June 27, 2019): 1–16, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jssp/article/view/4064>.

Meskipun presiden Iran dipilih oleh rakyat setiap empat tahun sekali, namun konstitusi Iran mengatur bahwa parlemen tidak memiliki wewenang untuk memakzulkan presiden, karena wewenang tersebut ada di tangan supreme leader (Rahbar) Iran. Dengan demikian, Presiden terpilih Iran wajib tunduk dan menyampaikan setiap kebijakannya kepada pemimpin tertinggi Iran. Dalam konstitusi Iran, supreme leader (Rahbar) atau pemimpin tertinggi Iran merupakan kepala negara sedangkan presiden adalah kepala pemerintahan. Dengan dihapuskannya perdana menteri dari sistem ketatanegaraan Iran, maka yang menjalankan roda pemerintahan mutlak ada ditangan presiden. Hal ini nampak tundak tindih apabila kita lihat sistem ketatanegaraan Iran sebelum amandemen tahun 1989. Terdapat dua lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai penggerak roda pemerintahan.

Adapun mengenai struktur pemerintahan republik Islam Iran pasca revolusi Islam bisa dilihat dari bagan dibawah ini:



Bertepatan dengan 10 tahun kemenangan revolusi Islam Iran dan pemilihan presiden, Republik Islam Iran mengamandemen konstitusi tahun 1979 pada tahun 1989. Beberapa pasal yang diamandemen pada saat itu adalah pasal 5, 107, 109, 111 serta penambahan pasal 176 yaitu tentang pembentukan Dewan Tertinggi Keamanan Nasional. Dibentuknya Dewan Tertinggi Keamanan Nasional sesuai dengan Konstitusi Iran pasal 176 adalah untuk melindungi kepentingan nasional, melindungi Republik Islam dan keutuhan wilayah serta kedaulatan nasional. Dewan Tertinggi Keamanan Nasional dibentuk dibawah kepemimpinan presiden Iran, sedangkan tentara Iran pemimpin tertingginya adalah Rahbar (*supreme leader*).

Angkatan Bersenjata Iran menurut konstitusi terdiri dari ; 1. Tentara (Artesh), 2. Pasukan penjaga revolusi Islam (Islamic Revolution Guard Corps; Pasdaran) yang didirikan setelah revolusi Islam pada 22 April 1979, 3. Pasukan penegakkan hukum atau polisi. Ketiga angkatan bersenjata tersebut bertanggung jawab langsung secara penuh kepada pemimpin tertinggi Iran (*Supreme Leader; Rahbar*)

Adapun wewenang dan tanggung jawab Rahbar (*supreme leader*) menurut pasal 110 Konstitusi Republik Islam Iran adalah : 1. Menentukan politik secara keseluruhan sesuai dengan system yang ada di Republik Islam Iran setelah berkonsultasi dengan dewan kemaslahatan dan kearifan, 2. Mengawasi secara umum setiap kebijakan, 3. Mengeluarkan referendum, 4. Panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Islam Iran, 5. Menyatakan perang, perdamaian, dan

memobilisasi pasukan bersenjata, 6. Mengangkat, memberhentikan dan menerima pengunduran diri para dewan ahli (*majelis negahban*), posisi tertinggi dari kekuasaan kehakiman, presiden media (*Islamic Republic of Iran Broadcasting*), *commander in chief* Pasukan penjaga revolusi Islam (*Islamic Revolution Guard Corps; Pasdaran*), panglima tinggi tentara (*artesh; army*), 7. Mengkoordinir 3 lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan menyelesaikan konflik diantara lembaga tersebut, 8. Menyelesaikan masalah dalam system yang sulit diselesaikan dengan cara biasa melalui Dewan Kemaslahatan dan Kearifan, 9. Menandatangani SK terpilihnya presiden hasil dari Pemilu serta menentukan layak atau tidaknya seseorang menjadi kandidat presiden, 10. Memberhentikan presiden setelah ditetapkan keputusan hukumnya oleh Mahkamah Agung atau Majelis Permusyawaratan Islam sesuai dengan pasal 89 konstitusi Iran, 11. Mengampuni atau mengurangi hukuman narapidana sesuai dengan kriteria Islam setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala kekuasaan kehakiman.

Selain itu, Pemimpin tertinggi Iran dapat diberhentikan dari tugasnya apabila tidak lagi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atau kualifikasi seperti yang diwajibkan dalam pasal 5 dan 109 konstitusi Iran tidak dimilikinya lagi serta keputusan tersebut akan ditetapkan oleh dewan ahli/pakar (*Majelis Khubregan; Council of Experts*). Apabila Rahbar (*supreme leader*) berhalangan tetap (mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal), maka dewan ahli bertanggung jawab untuk menunjuk Rahbar (*supreme leader*) baru sesegera mungkin.

Pemegang kekuasaan tertinggi Iran setelah Rahbar (*supreme leader*) adalah Presiden. Presiden bertanggung jawab untuk melaksanakan konstitusi dan memimpin eksekutif kecuali dalam hal yang secara langsung berkaitan dengan Rahbar (*supreme leader*) sesuai dengan pasal 113. Presiden Iran dipilih langsung oleh rakyat untuk masa periode empat tahun dan Pemilihannya berturut-turut diizinkan hanya untuk satu periode tambahan. Selain itu, presiden Iran juga harus memiliki kualifikasi ; 1. Memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, 2. Berkewarganegaraan Iran, 3. Memiliki catatan masa lalu yang jelas, 4. Jujur dan shaleh, 5. Serta percaya pada dasar-dasar republik Islam dan negara resmi negara.

Kesimpulan

Republik Islam Iran mengambil kebijakan yang mainstream dibanding dengan negara-negara lain. Disaat negara-negara lain merapat kepada Amerika Serikat, Iran malah tampil berbeda dengan tidak bergantung kepada Amerika Serikat. Menurut Iran, Amerika harus konsisten dan mengikuti aturan-aturan internasional jika ingin berdialog dan menjalin hubungan dengan negara lain terutama negara Iran. Keputusan yang dibuat Amerika Serikat ditingkat internasional tidak jarang diputuskan secara sepihak seperti instruksi Donald Trump untuk memindahkan ibukota Israel ke Yerusalem. Namun disisi lain juga Iran memiliki tantangan berat, karena dunia sekarang lebih terbuka dan mengarah ke yang bersifat liberal, sehingga kebijakan Iran untuk mempertahankan system negara yang berlandaskan syariat Islam mendapatkan tantangan berat yang harus kontekstual dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. System politik yang telah

diamandemen pada tahun 1989 harus mampu memberikan solusi ditengah kuatnya tekanan masyarakat internasional terutama Amerika dan sekutu terhadap system Iran yang ulama sentris.

Daftar Pustaka

- Curtis, Glenn E, and Eric Hooglund. *Iran: A Country Study: A Country Study*. Government Printing Office, 2008.
- Fatoni, Achmad. "Program Pengembangan Nuklir Iran Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarat Iran (1957-2006 M)." *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 3, no. 1 (June 27, 2019): 1–16. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jssp/article/view/4064>.
- Jones, Stephen. "The Islamic Republic of Iran: An Introduction." *Economic indicators* 3 (2009): 9.
- Khomeini, Ruhollah. *Islamic Government: Governance of the Jurist*. Alhoda UK, 2005.
- Mikail, Kiki. "IRAN DI TENGAH HEGEMONI BARAT (Studi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi 1979)." *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 13, no. 2 (2013).
- Richard, Nikki R. Keddie and Yann. *Modern Iran; Roots and Result of Revolution*. Yale University Press, 2006.
- Said Amir Arjomand. "Iran's Islamic Revolution in Comparative Perspective." *World Politics, Cambridge University Press* 38, no. 3 (1986): 385.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Swearingen, Will D. "Geopolitical Origins of the Iran-Iraq War." *Geographical Review* (1988): 405–416.
- Islamic Republic of Iran Constitution*. Iran, n.d.